

TINJAUAN YURIDIS *SMART CONTRACT* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ASET DIGITAL DI METAVERSE MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Oleh: Alya Quratuaini¹, Herliana²

INTISARI

Penulisan hukum ini memiliki tujuan untuk pertama mengetahui dan menganalisis keabsahan dan peluang pengaturan *smart contract* dalam transaksi jual beli aset digital di Metaverse ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, menganalisis perlindungan hukum kepada pengguna Metaverse terhadap risiko yang muncul dalam transaksi jual beli aset digital di Metaverse ditinjau dari berbagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penulisan hukum ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder dan didukung dengan wawancara kepada narasumber. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta didukung dengan pendapat ahli melalui wawancara narasumber. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia transaksi jual beli aset digital di Metaverse yang menggunakan model *smart contract* merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat sepanjang terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang diuraikan dalam penulisan hukum ini. Kedua, perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan aset digital di Metaverse. Ketiga, perlindungan hukum bagi pengguna Metaverse dalam transaksi jual beli aset digital di Metaverse terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berupa penerapan UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi, PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Perlindungan hukum represif dapat ditempuh oleh pengguna melalui upaya penyelesaian sengketa melalui non litigasi dan upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi.

Kata Kunci: *Smart Contract*, Aset Digital, Metaverse, Perlindungan Hukum

¹ Mahasiswa Strata 1 (S-1) pada Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

² Dosen pada Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

JURIDICAL REVIEW OF SMART CONTRACT IN THE SALE AND PURCHASE AGREEMENT OF DIGITAL ASSET ON METAVERSE ACCORDING TO INDONESIAN LAWS

By: Alya Quratuaini³, Herliana⁴

ABSTRACT

The purpose of this research is, first find out and analyze the legality and potential regulations regarding smart contract used in the sale and purchase agreement of digital property in Metaverse according to the Indonesian's laws. Second, to analyze the legal protection provided to user in Metaverse against the risk arises in the sale and purchase agreement of digital asset on Metaverse in terms of various regulations prevailing in Indonesia.

This is a juridical-normative research conducted by using secondary data supported by interview with informant. Secondary data in this study is gathered from literature studies in form of legal primary, secondary and tertiary materials and were supported by expert opinion through interview with informant. The data gathered is then analyzed by using qualitative method.

This research shows that first, the sale and purchase agreement of digital asset in Metaverse using the smart contract model is a valid and binding agreement under the Indonesian's Law. Second, it is necessary to establish a regulation that regulates the trading of digital asset in the Metaverse in the form of an Act. Third, legal protection provided for users in the sale and purchase agreement on Metaverse can be reviewed through two types of protection namely preventive dan repressive legal protection. Preventive legal protection is enforced through the implementation of the Information and Electronic Transaction Act, the Consumer Protection Act, the Personal Data Protection Act, the GR for Trading Through Electrocnic System, and the GR for Electronic System and Transaction. Whereas, repressive legal protection can be taken by users in the form of non litigation dispute resolution and litigation dispute settlement.

Keywords: Smart Contract, Digital Asset, Metaverse, Legal Protection

³ Undergraduate Student of Civil Law Department in Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta.

⁴ Lecturer of Civil Law Department in Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta.